

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN 2016-2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan			Sumber Data	Penanggung Jawab	
			Makna Indikator	Alasan Pemilihan Indikator	Cara Perhitungan Indikator			
MISI I :								
MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN								
1	Meningkatnya kualitas pendidikan	1	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.	Untuk meningkatkan pembangunan unit sekolah atau ruang kelas baru, pemberian beasiswa bagi penduduk kurang mampu, pembebasan uang sekolah, pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi, dsb.	variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan	Dinas Pendidikan, BPS	Dinas Pendidikan
		2	Angka Harapan Lama Sekolah	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur 7 tahun di masa mendatang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.	Untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ <p>Keterangan: <math>HLS_a^t</math> Harapan Lama Sekolah pada umur <math>a</math> di tahun <math>t</math> <math>E_i^t</math> Jumlah penduduk usia <math>i</math> yang bersekolah pada tahun <math>t</math> <math>P_i^t</math> Jumlah penduduk usia <math>i</math> pada tahun <math>t</math> <math>i</math> Usia (<math>a, a + 1, \dots, n</math>) <math>FK</math> Faktor koreksi pesantren</p>	Dinas Pendidikan, BPS	Dinas Pendidikan
2	Meningkatnya kualitas kesehatan	3	Usia Harapan Hidup	Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur $x$ , pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.	Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.	Idealnya angka harapan hidup dihitung berdasarkan angka kematian menurut umur, yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian.	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		4	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran)	Kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dll	Informasi mengenai tingginya MMR akan bermanfaat untuk pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan kehamilan dan membuat kehamilan yang aman bebas risiko tinggi (making pregnancy safer).	$AKI = \frac{D_{hamil}}{JLH} \times 1000$ <p><math>D_{hamil}</math> : Jumlah Kematian ibu dalam tahap kehamilan atau kelahiran <math>JLH</math> : Jumlah Kelahiran Hidup</p>	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		5	Angka Kematian Bayi (per 1000 kelahiran)	Angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup).	Angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.	$AKB = \frac{\sum K_{0- < 1th}}{\sum Kelahiran\ Hidup} \times 1000$ <p>Dimana, <math>K_{0- &lt; 1th} \equiv</math> Kematian bayi usia di bawah 1 (satu) tahun</p>	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		6	Prevalensi Kekurangan Gizi	Balita gizi buruk adalah balita dengan status gizi berdasarkan indeks berat badan (BB) menurut panjang badan (BB/PB) atau berat badan (BB) menurut tinggi badan (BB/TB) dengan Z-score < -3 SD (sangat kurus) dan/atau terdapat tanda-tanda klinis gizi buruk lainnya (marasmus, dan marasmus - kwasiorkor)	Balita gizi kurang adalah balita yang hasil penimbangannya berada di bawah garis merah pada kartu menuju sehat (KMS)	Jumlah Balita dengan status gizi kurang/buruk x 100%	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

MISI II :								
MEWUJUDKAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERKEADILAN								
3	Meningkatnya investasi daerah	9	Nilai Investasi PMA dan PMDN (Rp)	Realisasi Investasi yang terdiri atas PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN ( Penanaman Modal Dalam Negeri)	Untuk Mengetahui capaian kerja kinerja pertahun	Jumlah nilai investasi (Rp)	Penanaman Modal	KP2TPM
		10	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Realisasi Investasi yang terdiri atas PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)	Untuk Mengetahui persentase capaian kerja kinerja pertahun	Realisasi Investasi x 5%	Penanaman Modal	KP2TPM
	Meningkatnya peranan UMKM serta koperasi dalam perkuatan struktur pereekonomian daerah	13	Persentase Koperasi Aktif	Koperasi yg aktif dalam melakukan kegiatan usaha	Karena dengan bertambahnya aset menggambarkan keberhasilan koperasi sebagai badan usaha	Dari laporan RAT koperasi	Bidang Koperasi dan UK/M	Diskoperind
		12	Persentase rata - rata peningkatan aset Koperasi per tahun	Harta kekayaan yang dimiliki oleh koperasi	Untuk meningkatkan aset koperasi	Jumlah agregat nilai koperasi pada tahun N - Nilai aset pada tahun N-1 dibagi Jumlah nilai aset tahun N-1 x 100%	Bidang Koperasi dan UK/M	Diskoperind
4		11	Persentase pertumbuhan IKM	IKM yang memiliki kemampuan dalam berinovasi dan berkreasi dengan memanfaatkan sumber daya alam	IKM yang memiliki kompetensi inti daerah sebagai salah satu syarat menghasilkan produk unggulan daerah	Jumlah produk IKM th N (yg di fasilitasi)	Bidang Perindustrian	Diskoperind
5	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	14	Tingkat Ketersediaan Pangan Utama (Ton/Tahun)	Pemantapan ketersediaan pangan baik hewani maupun nabati dalam jumlah dan keragaman untuk mendukung konsumsi pangan sesuai kaidah kesehatan dan gizi seimbang.	Dipertahankannya ketersediaan energi per kapita minimal 2.000 kilokalori/hari dan penyediaan protein per kapita minimal 57 gram/hari	Persentase Peningkatan skor PPH Ketersediaan	Ketapang	Ketapang
		15	Tingkat Konsumsi Pangan Utama (kg/kapita/tahun)	Meningkatkan pengankaragaman konsumsi pangan berbasis bahan baku pangan lokal;	Peningkatan konsumsi pangan per kapita untuk memenuhi kecukupan energi minimal 2000 kilokalori/hari dan protein sebesar 52 gram/hari	Persentase Peningkatan Skor PPH Konsumsi	Ketapang	Ketapang
6	Menurunnya angka pengangguran terbuka	7	Tingkat pengangguran terbuka	Mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja	Jumlah pengangguran / Jumlah angkatan kerja x 100%	Disnakertran, BPS	Dinsosnakertran
7	Menciptakan hubungan industrial yang harmonis	8	Prosentase perselisihan hubungan industrial	Melindungi Hak-hak tenaga kerja yang bekerja	Terlindunginya hak-hak tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan	Jumlah kasus yang diselesaikan / Jumlah kasus yang tercatat x 100%	Disnakertran, BPS	Dinsosnakertran
MISI III :								
MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG BERKESINAMBUNGAN								
8	Meningkatnya kapasitas dan kualitas prasarana transportasi dan komunikasi	16	Persentase jalan dalam kondisi baik	Meningkatnya kualitas layanan jalan kabupaten	Meningkatkan kinerja pelayanan infrastruktur Jalan	$\frac{\text{Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Total panjang jalan kabupaten}} \times 100\%$	Dinas PUPR	Bidang Binamarga
		17	Persentase konektivitas wilayah	Meningkatkan konektivitas wilayah antara pusat kegiatan dan pusat produksi	Melakukan pembangunan/penambahan ruas jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi yang belum terhubung dengan jaringan jalan	$\frac{\text{Panjang jalan penghubung pusat2 kegiatan dan pusat produksi}}{\text{Target keseluruhan panjang pusat2 kegiatan dan pusat produksi}} \times 100\%$	Dinas PUPR	Bidang Binamarga
		18	Persentase jembatan dalam kondisi baik	Meningkatnya kualitas layanan jalan kabupaten	Meningkatkan kinerja pelayanan infrastruktur Jalan	$\frac{\text{Panjang jembatan dalam kondisi baik}}{\text{Total panjang jembatan kabupaten}} \times 100\%$	Dinas PUPR	Bidang Binamarga
9	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air untuk pertanian pada lahan irigasi dan pemenuhan kebutuhan air baku untuk air bersih	19	Persentase kinerja sistem irigasi	Pembangunan/peningkatan dan rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi	Meningkatkan kinerja sistem jaringan irigasi	$\frac{\text{Ketersediaan air irigasi} \frac{1}{\text{det}} \text{ pada setiap musim tanam}}{\text{Kebutuhan air irigasi} \frac{1}{\text{det}} \text{ berdasarkan rencana tata tanam}} \times 100\%$	Dinas PUPR	Bidang Sumber Daya Air
		20	Persentase penanganan daya rusak air	Meningkatkan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kualitas lingkungan yang disebabkan daya rusak air	Meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kualitas lingkungan yang disebabkan daya rusak air	$\frac{\text{Jumlah panjang sungai rawan bencana yang tertangani}}{\text{Total panjang sungai rawan bencana}} \times 100\%$	Dinas PUPR	Bidang Sumber Daya Air

10	Meningkatnya prasarana dan sarana perumahan dan fasilitas umum	21	Persentase penduduk yang mendapatkan air minum yang aman	Meningkatkan kualitas layanan air minum	Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan air minum	$\frac{\text{Masyarakat yang terlayani (jawa)}}{\text{Total masyarakat di seluruh kabupaten (jawa)}} \times 100\%$	Dinas PUPR	Bidang Cipta Karya
		22	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	Meningkatkan kualitas pelayanan air limbah	Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan sistem air limbah	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang terlayani tangki septik/MCK}}{\text{Jumlah total penduduk seluruh kabupaten}} \times 100\%$	Dinas PUPR	Bidang Cipta Karya
		23	Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase	Meningkatkan kualitas drainase permukiman	Meningkatkan pelayanan infrastruktur drainase	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang terlayani jaringan drainase}}{\text{Total jumlah penduduk kawasan perkotaan}} \times 100\%$	Dinas PUPR	Bidang Cipta Karya
		24	Persentase rumah layak huni	Peningkatan rumah layak huni	Untuk meningkatkan jumlah layak huni dengan kegiatan bedah rumah	$\frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah rumah seluruhnya}} \times 100 \%$	Perkim	Perkim
11	Tersedianya prasarana fasilitas publik yang memadai	25	Persentase bangunan publik yang layak pakai	Meningkatkan ketersediaan fasilitas publik bagi warga masyarakat	Meningkatkan kualitas bangunan publik yang sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah bangunan publik yang layak pakai}}{\text{Total kebutuhan bangunan publik}} \times 100\%$	Dinas PUPR	Bidang Cipta Karya
12	Terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan	26	Persentase tersedianya informasi rencana tata ruang wilayah	Meningkatkan ketersediaan informasi penataan ruang	Percepatan penyelesaian norma, standar, prosedur dan kriteria tentang rencana tata ruang wilayah	$\frac{\text{Jumlah peta analog/digital rencana tata ruang yang tersedia}}{\text{Total peta analog/digital rencana tata ruang yang harus tersedia}} \times 100\%$	Dinas PUPR	Bidang Tata Ruang
		27	Persentase tersedianya luasan RTH	Meningkatkan ketersediaan RTH	Penyediaan dan pembangunan RTH publik	$\frac{\text{Luasan RTH publik yang tersedia}}{\text{Luasan RTH publik yang seharusnya pada perkotaan}} \times 100\%$	Dinas PUPR	Bidang Tata Ruang

#### MISI IV :

#### PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM (POTENSI LOKAL) BERDASARKAN KEARIFAN LOKAL

10	Pemanfaatan sumber daya alam bidang pertanian	28	Produksi Tanaman Pangan (ton)	Peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai	Mendukung swasembada pangan nasional	Jumlah produksi padi, jagung dan kedelai per tahun (ton)	Pertanian	Pertanian
		29	Produksi Hortikultura (ton/Ha)	Peningkatan produksi sayuran dan biofarma	Penyesuaian program dengan kementerian dan dinas propinsi	Jumlah produksi sayuran dan biofarma per tahun (ton)	Pertanian	Pertanian
				Peningkatan produksi buah dan tanaman hias	Produk unggulan daerah	Jumlah produksi buah dan tanaman hias per tahun (ton)	Pertanian	Pertanian
		30	Swasembada daging (Kg)	Jumlah produksi daging terhadap kebutuhan masyarakat	Untuk mengetahui ketersediaan, kebutuhan dan kecukupan protein hewani masyarakat	Kebutuhan Kg per kapita per tahun	Pertanian	Pertanian
		31	Produksi Perkebunan (Ton)	Peningkatan hasil produksi perkebunan	Luas lahan perkebunan hampir 30% dari luas kabupaten Balangan dan merupakan sentra kawasan karet	Jumlah produksi per tahun (ton)	Pertanian	Pertanian
11	Pemanfaatan sumber daya alam bidang perikanan	32	Produksi Ikan (ton/tahun)	Jumlah semua hasil budidaya dan penangkapan ikan yang dipanen dari tempat pemeliharaan dan ditangkap dari sumber perikanan alami baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan dalam satuan ton	Untuk peningkatan budidaya dan produksi perikanan			Perikanan
		33	Konsumsi Ikan Masyarakat (Kg/Kapita/Tahun)					Perikanan
		34	Luas kawasan perikanan Lestari (ha)					Perikanan

12	Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisata	35	Jumlah kunjungan wisata	Potensi sumber daya alam dan tata lingkungannya sebagai objek tujuan wisata	Daya tarik tujuan wisatawan	$(\text{Jumlah kunjungan tahun } N-1) / (\text{Jumlah kunjungan tahun } N) \times 100\%$	Pariwisata	Pariwisata
13	Meningkatnya luas kawasan produktif transmigrasi yang dapat dimanfaatkan masyarakat	36	Prosentase luas kawasan transmigrasi yang dimanfaatkan oleh masyarakat	Dengan bertambahnya luas kawasan produktif transmigrasi maka akan berdampak pada meningkatnya pendapatan masyarakat transmigrasi	Semakin luas kawasan produktif yang dikelola oleh transmigran akan menambah pendapatan masyarakat transmigrasi dan PAD dari sektor pertanian juga akan meningkat	$\text{Luas lahan produktif yang telah dibuka} / \text{Luas kawasan transmigrasi} \times 100\%$	Disnakertrans	Disnakertrans

#### MISI V :

#### MENGEMBANGKAN SOSIAL BUDAYA KEMASYARAKATAN

14	Menurunkan angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	37	Prosentase Angka PMKS	Mengindikasi jumlah PMKS tiap tahun	Angka merupakan indikator yang jelas untuk menunjukan data / jumlah PMKS pada tahun n	$\text{Angka PMKS} = (\Sigma \text{PMKS Tahun } (n-1) - \Sigma \text{PMKS tahun } (n)) \times 100 \%$	Dinsos	Dinsos
15	Terwujudnya kehidupan sosial yang harmonis, rukun dan damai di kalangan umat beragama	38	Persentase penanganan konflik sosial	Kemajemukan masyarakat yang ada cenderung berpotensi terjadinya konflik sosial.	Dengan ditanganinya konflik sosial yang terjadi maka diharapkan dapat mewujudkan ketentraman sosial di masyarakat	$(\text{Jumlah konflik sosial yang ditangani} / \text{Jumlah konflik sosial yang terjadi}) \times 100\%$	Kesbang	Kesbang
16	Tewujudnya pemberdayaan masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	39	Rasio kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana	Meningkatnya kesadaran, kemampuan, dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui pembentukan satuan reaksi cepat penanggulangan bencana	Rendahnya kapasitas masyarakat tentang kebencanaan	$\text{Jumlah komunitas masyarakat penanggulangan yang dibina} / \text{Jumlah komunitas masyarakat penanggulangan bencana pada daerah rawan bencana} \times 100\%$	BPBD	BPBD
17	Terwujudnya penanganan darurat bencana	40	Persentase penanganan bencana	penanganan kedaruratan bencana yang efektif	Kewajiban penanganan bencana	$\text{Jumlah bencana yang ditangani} / \text{Jumlah kejadian bencana} \times 100\%$	BPBD	BPBD
18	Terwujudnya pemulihan masyarakat dan sarana prasarana yang lebih baik	41	Persentase penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Penanggulangan bencana yang terencana, terarah, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh serta akuntabel	Untuk pemulihan pasca bencana	$\text{Jumlah objek terdampak yang ditangani} / \text{Jumlah keseluruhan terdampak} \times 100\%$	BPBD	BPBD
19	Meningkatkan pembinaan kepemudaan	42	Jlh organisasi kepemudaan yang aktif	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembinaan terhadap organisasi kepemudaan seperti karang taruna, Pramuka, dan lainnya	Untuk menggalakkan kegiatan kepemudaan dan olahraga bagi para pemuda dalam rangka menyalurkan kegiatan secara positif dan bermanfaat	$\text{Jlh organisasi kepemudaan aktif yang dibina} / \text{jml organisasi kepemudaan di Kab. Balangan} \times 100\%$	Kepemudaan	Dispora
20	Meningkatkan pembinaan olahraga	43	Jlh cabang olahraga berprestasi	Meningkatkan jenis dan cabang olahraga unggulan dan andalan balangan dalam pekan olahaga daerah		$\text{Jlh cabang olahraga prestasi di event prov atau nasional/jmh cabang prestasi} \times 100\%$	Olahraga	Dispora

#### MISI VI :

#### OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH

21	Diterapkannya E-Government guna peningkatan kualitas dan kecepatan layanan kepada masyarakat	44	Persentase jaringan dan infrastruktur e-government	Menyediakan infrastruktur dan jaringan pendukung e-government	Untuk meningkatkan kemampuan layanan pemerintah kepada masyarakat melalui sistem online	$\text{Jumlah penerapan egovernment/aplikasi pemerintah} \times 100\%$	Kominfo	Kominfo
		45	Persentase diseminasi dan pendistribusian informasi	Mengintegrasikan semua layanan on line SKPD dalam satu wadah yang memberikan banyak manfaat dan kemudahan layanan	Untuk meningkatkan kemampuan layanan pemerintah kepada masyarakat melalui sistem online	$\text{Jumlah Layanan Informasi Publik berbasis IT yang dihimpun dibagi dengan jumlah layanan informasi publik Daerah dikali } 100 \%$	Kominfo	Kominfo

22	Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah	46	Indeks kepuasan masyarakat terhadap semua pelayanan yang diberikan pemerintah daerah (%)	Penilaian terhadap pelayanan publik menyangkut segala aspek mencakup sistem, prosedur dan metode dalam memenuhi hak-hak publik, baik sebagai penyelenggara maupun pengguna pelayanan publik.	Pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik didefinisikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.	Pengolahan data nilai IKM dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Karena itu untuk pengolahan data dilakukan dengan cara: a. Membuat scoring/nilai persepsi untuk setiap alternatif jawaban (x) sebagai berikut : alternatif jawaban 'a' diberi nilai 1, 'b' diberi nilai 2, 'c' diberi nilai 3 dan 'd' diberi nilai '4'. b. Dalam penghitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap 14 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus : Bobot nilai rata-rata tertimbang = jumlah bobot = 1 = 0,071 jumlah unsur 14 c. Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut : IKM = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total Unsur yang terisi d. Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus : IKM Unit Pelayanan X 25	SKPD Pelayanan	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	49	Opini BPK atas LKPD	Opini wajar tanpa pengecualian (WTP = unqualified opinion), opini wajar dengan pengecualian (WDP = qualified opinion), menolak memberikan opini (disclaimer opinion), dan tidak wajar (adverse opinion).	Opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.	Rekomendasi laporan hasil pemeriksaan BPK RI menggambarkan keseriusan SKPD memperbaiki pengelolaan keuangan daerah dengan rumus : ( Jumlah Temuan BPK RI yang terselesaikan ) / ( Jumlah Total Rekomendasi BPK RI ) X 100%	Inspektorat	Inspektorat
		50	Nilai EKPPD Kabupaten	suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan system pengukuran kinerja.	Untuk mengetahui mengukur, menilai dan hasil kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Nilai EKPPD (Kemendagri)	Bag. Pemerintahan	Setda
		51	Nilai HE-SAKIP Kabupaten	Ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.	Untuk meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	HE-AKIP Kabupaten dari Kemepan RB	Bag. Organisasi	Setda

MISI VII :

MEWUJUDKAN KAMTIBMAS DAN KEPASTIAN HUKUM UNTUK TERCIPTANYA SUASANA YANG KONDISIF

24	Menurunnya angka pelanggaran ketertiban masyarakat	52	Angka pelanggaran Peraturan Daerah	Menegakan peraturan daerah	Untuk melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah ("Perda") dan/atau peraturan kepala daerah.	Jumlah pelanggaran perda = 0	Satpol PP	Satpol PP
25	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan melalui pelayanan berbasis SIAK	53	Cakupan kepemilikan dokumen penduduk	Rata-rata prosentase pelayanan dokumen kependudukan yang meliputi prosentase kepemilikan kartu keluarga, prosentase kepemilikan KTP-el, prosentase kepemilikan akta kelahiran, prosentase kepemilikan akta kematian dan prosentase kepemilikan akta perkawinan	Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara Nasional, Negara Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban melindungi dan memberikan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya yang dialami penduduk	Jumlah prosentase cakupan seluruh pelayanan dibagi (:) jumlah jenis pelayanan	DUKCATPIL	DUKCATPIL